

**DINAMIKA DEMOKRASI ELEKTORAL**  
**(Studi tentang Sentimen Anti-Partai di era Reformasi)**

**Imam Yudhi Prastya., MPA dan Yudhanto S.A., MA**

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan  
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang

[yudhiimam@yahoo.co.id](mailto:yudhiimam@yahoo.co.id) / [yudhanto\\_sa@ymail.com](mailto:yudhanto_sa@ymail.com)

**ABSTRACT**

*The existence of political parties in a country by many as a form of recognition of civil and political rights, and consequently the existence of political parties beginning in the process of political egalitarianism citizens. This research used a phenomenological approach, to see the meaning of the subject of understanding the structure, documentation studies also put the core in-depth interviews as data collection. Strengthening of anti-party sentiment we can traced from the election several times in the reform era: 1999, 2004, and 2009, with the decline in voter participation, voter volatility and declining party identification, which then also reinforced by the results survey released by the institutions, indicate the implications of anti-party sentiment, either reactive or cultural.*

**Key word: Politic parties, anti parties centiment, democracy**

**ABSTRAK**

Keberadaan partai politik di suatu negara oleh banyak sebagai bentuk pengakuan hak-hak sipil dan politik, dan akibatnya keberadaan partai politik awal dalam proses warga egalitarianisme politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, untuk melihat arti dari subjek memahami struktur, studi dokumentasi juga menempatkan inti wawancara mendalam sebagai pengumpulan data. Penguatan sentimen anti-partai kita dapat ditelusuri dari pemilu beberapa kali di era reformasi: 1999, 2004, dan 2009, dengan penurunan partisipasi pemilih, volatilitas pemilih dan identifikasi partai menurun, yang kemudian juga diperkuat oleh hasil survei yang dirilis oleh lembaga, menunjukkan implikasi dari sentimen anti-partai, baik reaktif atau budaya.

**Kata kunci: Partai Politik, Sentimen anti-partai, Demokrasi**

## PENDAHULUAN

Demokrasi selama ini dipercaya sebagai jalan “pencerahan”, emansipasi social, *sine qua non* perkembangan manusia, yang tanpanya tak ada kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Demokrasi menjadi semacam “jalan Tuhan” merealisasikan utopia. Sehingga “demokratisasi” dianggap sebagai sebuah proses positif-konstruktif absolute dalam mencapai tujuan emansipatif, seakan sejarah emansipasi manusia tak lebih dari manifestasi logis “esensi demokrasi” itu sendiri (Danujaya, 2012;75).

Partai politik memiliki arti penting dalam sebuah sistim demokrasi perwakilan. Partai politik diyakini sebagai instrumen yang strategis bagi perkembangan demokrasi modern Indonesia di masa depan. Namun sejak era reformasi terlihat adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, hal ini dapat dilihat menurunnya angka partisipasi masyarakat pada pemilu-pemilu reformasi, dan tingginya volatilitas pemilih serta penurunan identifikasi partai. Kondisi demikian mengiibaratkan partai politik layaknya setan yang dibutuhkan – *necessary evil* – , pada saat yang bersamaan Negara modern tidak memiliki alternative instutusi untuk menopang bekerjanya demokrasi seluar partai politik.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penulis membuat kesimpulan untuk menjadi rumusan masalah sebagai berikut ;  
Bagaimana dinamika perkembangan dan pelembagaan partai politik pasca reformasi?

## **KERANGKA TEORITIS**

### **1. Demokrasi**

Dalam memahami demokrasi dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu empirik-minimalis dan normatif-maksimalis (Suyatno, 2008;38). Demokrasi empirik-minimalis berpijak pada gagasan Schumpeter, Schumpeter memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif merebutkan suara rakyat (Diamond, 2003;9). Sama halnya dengan Huntington (Diamond, 2003;9). juga menganut pada pijakan yang sama yaitu menekankan pemilu yang kompetitif sebagai esensi dari demokrasi. Hal lain juga disebutkan bahwa demokrasi adalah membatasi pihak-pihak tertentu dalam menjalankan kekuasaannya. Ketika pemerintah terpilih (periode sebelumnya) kalah maka diwajibkan menyerahkan kekuasaannya (Gaus, 2012;342).

### **2. Komponen Demokrasi Elektoral**

#### **a. Pemilu**

Berpijak pada pandangan Schumpeter yang mengatakan pemilu merupakan titik sentral dari demokrasi dapat dimengerti meskipun mendapatkan kritik dari kalangan liberal atau maksimalis. Mengingat dengan adanya pemilu munculnya penguasa atau elit tidak lepas dari peran warga dalam menentukannya, meskipun dalam pendekatan ini (demokrasi electoral) kualitas yang dihasilkan dari pemilu seperti akuntabilitas pemerintahan terpilih masih disangsikan.

## **b. Partai politik.**

Menurut Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik adalah sekompok manusia yang terorganisir, sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil (Budiardjo, 2008;404). Ada beberapa fungsi partai politik (Surbakti, 1992;166); Sosialisasi politik, Rekrutmen politik, Komunikasi politik, Pengendalian konflik, Kontrol politik, Kaderisasi partai politik, Partisipasi politik.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif menurut Guba dan Lincoln (1985;198), *"Qualitative Methods are stressed within the naturalistic paradigm is antiquantitative but because qualitative methods come more easily to the human as instrument"*. Dalam penelitiankualitatif yang ditekankan adalah paradigma natural metode ini tidak melakukan pengujian teori lewat hipotesa-hipotesa tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Neuman (2000) adalah: *"descriptive research presenta picture of the a specific details of situation, social setting, or relationship. Theoutcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject.* Pemilihan jenis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam penelitian ini pertama-tama penulis akan menganalisa dinamika perkembangan partai politik pasca-reformasi dan munculnya sentimen anti-partaisme di Indonesia. Penelitian deskriptif menurut.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan ( *Library Research* )

Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

### b. Studi Lapangan ( *field research* )

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (dengan menggunakan pedoman wawancara) kepada para *key informan*, yaitu orang-orang yang kompeten yang memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

## PEMBAHASAN

### 1. Dinamika Demokrasi Elektoral Pasca Reformasi 1999-2009

#### a. Musim Tanam Demokrasi Elektoral

Pemilu 1999 merupakan awal dari pelaksanaan transisi dari demokrasi pasca keluar dari rezim orde baru. Selama orde baru pemilu telah dilakukan sebanyak 6 kali yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Dari sekian pemilu yang telah dilakukan tidak menggabarkan demokrasi yang substantif, dimana partai politik dipaksa untuk melebur diri pada pembilahan berdasarkan aliran, yaitu nasionalis dan agama oleh penguasa pada tahun 1973. Dengan peleburan partai yang berkontestasi pada pemilu 1971 maka masyarakat dan elit partai pada waktu itu tidak mempunyai pilihan lain. dengan dileburnya partai-partai pada term aliran tersebut tentunya memunculkan konflik tersendiri di dalam partai hasil fusi tadi. Tidak berhenti

sampai disitu, kemampuan penguasa untuk mengintervensi dalam partai-partai tersebut sangat kuat khususnya dalam penentuan keputusan-keputusan yang sifatnya strategis seperti pemilihan ketua umum partai (PPP dan PDI). Di sisi yang lain, penguasa melalui Golkar mendominasi suara pada pemilu dari periode ke periode pemilu. Kemampuan penguasa melalui alat-alat negara seperti militer dan birokrasi tentunya menjadi kekuatan yang efektif dalam menggerakkan masyarakat atau pemilih untuk menyuarkan pemilihan ke Golkar. Dengan situasi seperti itu maka tidak mengherankan ketika Golkar selalu menjadi pemenang dalam setiap pemilu.

#### **b. Mencari Format Demokrasi Prosedural**

Dengan perubahan format ini, maka mulai pemilu 1999 Indonesia dalam sistem kepartainya berganti dengan multi partai tidak lagi dwi partai. Eforia politik ini memang sangat terasa saat menjelang pemilu, partai yang mendaftar sebanyak 141 partai akan tetapi setelah diverifikasi mengerucut menjadi 48 partai politik peserta pemilu. Secara kategoris, dari 48 partai peserta pemilu 1999 dibedakan dalam 3 kelompok besar partai (Pamungkas, 2009:92); pertama, partai yang mengambil jalur kelas. Kedua, partai yang mengambil jalur aliran. Ketiga, persilangan antara partai yang mengambil jalur kelas dan aliran melahirkan kelompok partai yang bersifat *catch all*.

Pada pemilu 1999 partai yang berhak ikut kontestasi dalam pemilu adalah partai-partai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; memiliki kepengurusan lebih dari  $\frac{1}{2}$  dari jumlah provinsi, setiap provinsi memiliki kepengurusan  $\frac{1}{2}$  dari jumlah kabupaten, untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya partai harus memiliki 2% dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPRD provinsi/kabupaten-kota yang tersebar kurang dari  $\frac{1}{2}$  jumlah provinsi dan di  $\frac{1}{2}$  jumlah kabupaten seluruh Indonesia.

Pemilu 1999 dengan multi partai tidak menghasilkan kursi parlemen didominasi oleh satu partai politik, meskipun partai tersebut menang dalam pemilu. Sangatlah masuk akal ketika pemilu dengan sistem multipartai maka tidak akan menghasilkan suara mayoritas di tingkat parlemen.

Hal yang menarik kemudian dicermati adalah kekuatan-kekuatan politik hasil pemilu 1999 dapat terakomodir atau bisa dikatakan kekuasaan di pemerintahan dapat dibagi habis kepada kekuatan-kekuatan politik yang ada. Mulai dari Presiden, wakil Presiden, Ketua MPR dan Ketua DPR diisi oleh partai politik berbeda yang pada sebelumnya mereka bertarung dalam pemilu maupun dalam parlemen. Tercatat, komposisi kabinet terdiri dari 6 wakil TNI, 5 wakil fraksi reformasi, 4 wakil partai Golkar, 4 wakil PDIP, 8 wakil PKB, 2 wakil PPP dan 1 wakil dari PBB (Pamungkas, 2009:99).

### **c. Pemilu 2004**

Sebagai bentuk kedaulatan rakyat, pada pemilu tahun 2004 ada perubahan yang mendasar baik dari segi pemilihan dan keterwakilan. Sebagai respons dari ketidakseimbangan antara perwakilan politik yang berasal dari Jawa dan luar Jawa yang disebabkan konsentrasi jumlah penduduk berada di Jawa. Anggota DPD dipilih melalui Pemilu berbarengan dengan Pemilu Legislatif dan setiap provinsi diwakili oleh 4 orang anggota DPD tersebut.

Syarat pemilu 1) memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah provinsi. 2) memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari jumlah kabupaten/kota di provinsi. 3) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai. 4) partai politik harus mempunyai kantor tetap.

Berdasarkan persyaratan 24 partai lolos, 6 dari 24 partai otomatis mengikuti

pemilu.18 diantaranya merupakan perubahan dari partai yang tidak lolos *electoral threshold* dan partai baru seperti Demokrat, Persatuan daerah dan terakhir pecahan partai lama. Terdapat 550 kursi anggota DPR. Sistem yang dipakai sama dengan pemilu 1999, yaitu perwakilan proporsional terbuka (*proportional representation system-open list*). Secara teoritik, sistem ini menjadikan partai politik akan memperoleh kursi sebanding dengan perolehan suara.

Terkait dengan *electoral threshold*, syarat untuk partai politik dapat menguti pemilu berikutnya dengan 3% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% dari jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya ½ jumlah provinsi seluruh Indonesia atau memperoleh sekurang-kurangnya 4 % jumlah kursi DPRD kab/kota yang tersebar di ½ jumlah kab/kota seluruh Indonesia.

Dibanding pemilu 1999 antusiasme pemilih di 2004 mengalami penurunan yang signifikan, menurut Direktur Eksekutif Centre For Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay menguraikan, pada tahun 1999 tingkat partisipasi dalam Pemilu tercatat 92 persen. Selanjutnya pada tahun 2004 menurun dan mencapai 84,1 persen (Kompas.com, 2011/10/19). Fenomena tersebut mungkin disebabkan peristiwa-peristiwa politik, konflik sosial, ekonomi yang tidak kunjung membaik serta persoalan keamanan nasional yang dihubungkan dengan persoalan terorisme.

Pemilu legislatif dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden dan wakil presiden, dimana pemilu 2004 diikuti 5 pasang calon. Pada pemilihan presiden, kandidat yang memenangi pemilu manakalah memperoleh 50 % lebih suara sah. Akan tetapi karena peserta relatif banyak maka hal ini memaksa untuk dilanjutkan putaran kedua tgl. 20 September 2004. Pada pemilihan putaran pertama Dua pasang yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan Susilo Bambang

Yudhoyono -J. Kalla dengan 22.58% suara dan Megawati-Hasyim M. dengan 26.24% suara.

Dalam pemilu Presiden langsung yang pertama kali dilakukan di Indonesia, kandidat presiden dan wakil presiden harus diusung oleh partai politik. dimana partai politik yang sekurangnya memperoleh 15 % kursi di DPR atau 20 % dari perolehan suara sah secara nasional dalam pileg.

#### **d. Pemilu 2009**

Pemilu 2009 diikuti oleh 28 partai politik akan tetapi hanya 9 partai saja yang lolos dari parliamentary Threshold dan terdapat 2 partai baru yaitu partai Gerindra dan Hanura. Meskipun partai baru akan tetapi partai tersebut mampu bersaing dalam memperoleh suara dengan partai-partai yang sudah mengikuti pemilu sebelumnya. Dengan perolehan suara yang masih dibawah partai-partai lama dengan 4.46% untuk Gerindra dan 3.77% untuk Hanura cukup mengantarkan kader mereka duduk di DPR.

Dalam pemilu presiden tahun 2009 terdapat 3 pasang calon; yaitu pasangan J.Kalla-Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, Megawati-Prabowo. Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono meskipun menang dalam pemilu dengan dukungan 20.85 % kursi di DPR tentunya tidak cukup dalam mengamankan kekuasaannya. Maka partai demokrat membutuhkan dukungan dari partai lain dalam mengamankan pemerintahan atau dukungan kebijakan-kebijakan dikemudian hari. Maka dalam susunan kabinet sangat terlihat sekali dimana koalisi yang lebih pada bagaimana mengamankan kekuasaan. koalisi yang terbangun diantaranya ; Partai Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP, Golkar.

## **2. Sentimen Anti-Partaisme**

Pemilu 1999 harapan besar periode pertama untuk membingkai kembali

harapan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik, euforia harapan tersebut tampak dengan tingkat partisipasi publik mencapai 92% dari total pemilih 171. 265. 422. Periode pasca pemilu 1999-2004 negara (DPR dan MPR) mendesain ulang kelembagaan politik antara eksekutif dan legislatif menuju *cheks and balances* sistem Presidensialisme yang lebih mapan.

Namun, tingkat partisipasi dan kepercayaan publik pada partai politik tidak bertahan lama, lambat laun tingkat keikutsertaan publik pada pesta demokrasi (baca; pemilu), mengalami penurunan secara terus menerus (23,34 persen pada pemilu 2004. Bahkan pilpres putaran pertama angka golput mencapai 21,5 persen, angka ini meningkat menjadi 23,3 persen pada pilpres putaran kedua. Peningkatan angka Golput tidak hanya terjadi di pemilu legislatif dan pilpres, namun juga terjadi dalam pilkada yang rata-rata berkisar 27,9) Gejala ketidak-ikutsertaan publik dalam demokrasi elektoral ini dapat dinyatakan sebagai bentuk sentimen anti-partaisme.

Terdapat dua bentuk anti-Partaisme, yakni anti-partaisme reaktif dan anti-partaisme kultural (Dalam Pamungkas, 2011;226). Anti-Partaisme reaktif adalah sebuah sikap kritis dari warga negara dalam merespon ketidakpuasan mereka terhadap kinerja elit dan istitusi partai. Sedangkan anti-partaisme kultural adalah ekspresi ketidak-senangan terhadap eksistensi partai politik dalam sebuah negara dan melakukan penolakan terhadap keberadaan partai politik, ketika anti-partaisme reaktif masih memberikan toleransi terhadap partai politik akan tetapi publik kecewa dengan kinerja partai politik.

Berkembangnya sikap anti-partai dalam pandangan Philips Vermote, merupakan bentuk kedewasaan berpolitik dalam artian selalu meletakkan curiga 'mengkritisi' kekuasaan :“Hasil survei menunjukkan antipartai tapi dari sisi kebajikannya memang jangan percaya apapun yang dikatakan politisi, kita memang harus selalu mencurigai kekuasaan” ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)).

Sentimen negatif dan ketidakpercayaan terhadap partai politik tentu bukan sesuatu yang muncul sekejap, melainkan merupakan suatu proses akumulasi kekecewaan setelah kita melalui tiga kali pemilu demokratis. Asal muasalnya adalah pada periode awal masa reformasi, di mana partai gagal menjawab euforia demokrasi, harapan, dan tingkat kepercayaan rakyat yang begitu tinggi terhadap partai.

Kegagalan ini berimbas pada munculnya ketidakpercayaan terhadap partai dan membuat masyarakat semakin banyak yang pragmatis. Rakyat yang pragmatis, seperti juga para politisi, tidak lagi berpikir panjang. Mereka tak lagi percaya janji-janji partai (Tanuwidjaja, nasional.kompas.com, 2012/03/14)

Situasi ini akhirnya memperkuat pola perilaku partai yang pragmatis karena hanya dengan berlaku semakin pragmatis mereka bisa memenuhi permintaan rakyat yang semakin pragmatis pula. Siklus ini terus berlanjut dan sejalan dengan waktu sentimen negatif terhadap partai yang dipupuk dengan pragmatisme politik semakin menjalar dan mengakar.

Peran parpol sebagai salah satu faktor penting dalam memasuki fase konsolidasi demokrasi ternyata belum bisa diharapkan. Fungsi parpol harus dijernihkan kembali agar parpol bisa dihadirkan kembali sebagai pilar utama penopang sistem demokrasi konstitusional. Hal itu bisa dilakukan hanya dengan menumbuhkan kembali apa yang oleh HA Giroux (1992) disebut sebagai suatu budaya baru, yaitu sebuah budaya yang didefinisikan sebagai acuan dan praktik bagi kewarganegaraan yang kritis, perjuangan untuk demokrasi dan kepedulian terhadap kesejahteraan umum (*bonum commune*). Dengan kata lain, diperlukan sebuah transformasi kultural untuk merekonstruksi struktur kekuasaan. Kekuasaan memang sungguh memikat, namun pesona dari kekuasaan tersebut bisa berubah mengeroposkan komitmen pada nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Parpol yang hakikatnya merupakan instrumen untuk meraih kekuasaan kini telah keropos justru oleh ambisi meraih kekuasaan tanpa kejujuran dan akuntabilitas dari para elite politik. Patrick Dobel (1999) pernah mengemukakan bahwa seseorang yang mengejar kuasa bisa mengalami deindividuasi (*deindividuation*), yaitu suatu situasi saat seseorang merasa terbebas dari pembatasan moral dalam dirinya yang bisa berakibat hilangnya perasaan identitas diri dan tanggung jawab. Orang-orang yang mengalami proses deindividuasi inilah yang kini telah membajak parpol, sehingga parpol kian mengalami krisis jati diri. Menjernihkan kembali fungsi parpol dengan membebaskannya dari para pembajak tersebut akan mencegah kembalinya rezim totaliter yang siap membajak sistem demokrasi justru atas nama kegagalan parpol dalam meredefinisikan dan menjernihkan fungsi dirinya sebagai pilar utama penopang demokrasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Harapan besar pasca reformasi politik menuju ke konsolidasi demokrasi yang pada akhirnya mencapai kematangan demokrasi ternyata belum kunjung terwujud. Kekuasaan membutuhkan legitimasi dari warga negaranya, bentuk legitimasi kekuasaan dalam konteks demokrasi adalah tingkat partisipasi warga negara dalam politik (pemilu). Dilihat dari periode ke periode pemilu tingkat partisipasi warga negara terus menurun, baik pemilu legislatif maupun eksekutif pada tingkat pusat maupun daerah. Peran parpol sebagai salah satu faktor penting dalam memasuki fase konsolidasi demokrasi ternyata belum bisa diharapkan. Fungsi parpol harus dijernihkan kembali agar parpol bisa dihadirkan kembali sebagai pilar utama penopang sistem demokrasi konstitusional. Parpol yang hakikatnya merupakan instrumen untuk meraih kekuasaan kini telah keropos justru oleh ambisi meraih kekuasaan tanpa kejujuran dan akuntabilitas dari para elite politik.

Dari persoalan diatas maka partai politik harus mengembalikan kepercayaan publik yang termpuruk pada dewasa ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merevitalisasi partai politik mulai dari proses rekrutment, kaderisasi, pendidikan politik dan juga menciptakan transparansi keuangan partai politik. Selain itu juga partai politik harus menjaga konsistensi antara ideologi partai dengan; *pertama*, kebijakan atau program yang dihasilkan ketika partai tersebut masuk menjadi penentu kebijakan. *Kedua*, pola koalisi yang relevan dengan ideologi atau garis partai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, Kuskirdho. Mengungkap politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi. PT. Gramedia Pustaka Utama kerja sama Lembaga Survey Indonesia. 2009
- Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Bungin, Burhan. (ed). Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008
- Danujaya, Budirto. Demokrasi Disensus Politik Dalam Paradoks, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2012
- Dhakidae, Daniel. "Partai-partai Politik, Demokrasi, dan Oligarki", dalam Tim Litbang Kompas, "Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program", Kompas, 2004
- Diamond, Larry. *Developing Democracy Toward Consolodation*, IRE Press, Yogyakarta, 2003
- Efriza, Political Explore; Sebuah Kajian Ilmu Politik, Alfa Beta, Bandung, 2012.
- Fadillah Putra. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2003.
- Gerald F. Gaus et. All, Handbook Teori Politik, Nusa Media, Bandung, 2012
- Georg Sorensen, " Demokrasi dan Demokratisasi : Proses dan Prospek dalam Dunia yang Sedang Berubah", Pustaka Pelajar kerjasama Center for Critical Studies, Yogyakarta, 2003
- Marijan, Kacung. Sistem Politik Indoensia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde

Baru, Penerbit Kencana, Cet Ke-3 2012

Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press

Pamungkas, Sigit Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM. Yogyakarta, 2009.

----- Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia, Institute For Democracy and Welfarism. Yogyakarta. 2011.

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta. 1992.

Suyatno, Menjelajah Demokrasi. Humaniora. Bandung. 2008.

Utsman, Sabian., (2007). Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan; Sebuah Penelitian Sosiologis. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

#### **Media Online dan Surat Kabar**

Jajak Pendapat Kompas "Saatnya Titik Balik Partai Politik", 2010. <http://www.ditpolkom.bappenas.go.id>

Hasil Survey LSI (15-24 Maret 2007)

<http://nasional.kompas.com/read/2011/10/19/22585240/Tingkat.Partisipasi.Pemilih.Terus.Merosot>

[www.mpk.muhammadiyah.or.id](http://www.mpk.muhammadiyah.or.id)

[http://www.kpu.go.id/dmdocuments/saku\\_h.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/saku_h.pdf)

<http://partai.info/pemilu2009/hasilpemilulegislatif.php>

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

[www.kpu.go.id/dmdocuments/saku\\_h.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/saku_h.pdf)